

**PERLINDUNGAN GURU SEKOLAH NEGERI DALAM  
MENJALANKAN TUGAS PROFESIONAL DI SMA NEGERI 2  
PACITAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Oleh:**

**MOCHAMAD BAGUS ARMANDA**

**A210150199**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN GURU SEKOLAH NEGERI DALAM MENJALANKAN  
TUGAS PROFESIONAL DI SMA NEGERI 2 PACITAN**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**MOCHAMAD BAGUS ARMANDA**

**A210150199**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Harsono, SU**  
**NIDN. 06 2002 6001**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN GURU SEKOLAH NEGERI DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESIONAL DI SMA NEGERI 2 PACITAN

Diajukan Oleh:

**MOCHAMAD BAGUS ARMANDA**

**A210150199**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 20 November 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Harsono, S.U.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Suranto, S.Pd, M.Pd.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Tri Nur Wahyudi, S.Pd, M.Pd  
(Anggota II Dewan Penguji)

( ..... )  
( ..... )  
( ..... )

Dekan,

  
**Prof. Dr. Harun Joko Pravitno, M.Hum.**  
NIDN. 00 280465 01

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam artikel publikasi ilmiah yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bebas plagiat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu/dikutip dalam naskah dan disebutkan pada daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti artikel ini hasil plagiat, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surakarta, 13 November 2019



**Mochamad Bagus Armanda**  
**NIM. A210150199**

## **PERLINDUNGAN GURU SEKOLAH NEGERI DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESIONAL DI SMA NEGERI 2 PACITAN**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) pemahaman para guru terhadap Perlindungan Guru Sekolah Negeri dalam Menjalankan Tugas Profesional di SMA Negeri 2 Pacitan, (2) penerapan Perlindungan Guru Sekolah Negeri dalam Menjalankan Tugas Profesional di SMA Negeri 2 Pacitan. Sebanyak 6 guru profesional dijadikan narasumber untuk diwawancarai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Adanya empat regulasi yang menjadi payung hukum diberikan oleh pemerintah kepada para guru untuk menunjang tugas profesional guru sehari-hari (2) Penerapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap guru secara baik dan benar dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugas profesi sebagai seorang guru (3) Pemberian kesejahteraan dan tunjangan hidup terhadap profesi guru juga akan berdampak pada tanggung jawab dan peran profesi guru.

**Kata Kunci :** Perlindungan Guru, Kesejahteraan Guru Profesional, Tugas Profesional Guru

### **Abstract**

The research is aimed to describe : (1) understanding of the teachers of the Protection of Teachers Educational Affairs in the Running Tasks Professionals in SMA Negeri 2 Pacitan, (2) the application of the Protection of Teacher Educational Affairs in the Running Task Professionals in SMA Negeri 2 Pacitan. A total of six professional teacher were used as resource person to be interviewed. Type of this research is qualitative research by ethnography research. Data collection techniques used observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study indicate that (1) The existence of four regulations that become the legal umbrella given by the government for teacher to support the task of professional teacher's everyday (2) the application of which is done by the government in the run protection law against teachers are well and truly can provide a sense of safe and comfortable in the running duties profession as a teacher (3) the provision of welfare and benefits to live on the teaching profession will also have an impact on the responsibilities and role of the teaching profession.

**Keywords:** Teacher Protection, Teacher Professional Welfare , Teacher Professional Task.

## **1. PENDAHULUAN**

Profesi guru dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun di sisi

lain, perlindungan hukum terhadap profesi guru juga diperhatikan. Akhir-akhir ini media sosial sering ramai dengan diberitakan seorang guru yang diadukan oleh peserta didik kepada orang tua peserta didik karena telah melanggar beberapa kekerasan fisik terhadap tenaga pendidik, juga berita yang telah dianiaya dan dikeroyok peserta didik.

Guru dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat menyelaraskan karakter berbasis kearifan lokal, agar budaya tidak tergerus oleh kecanggihan teknologi. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal dalam (Mudlofir, 2012).

Perlindungan profesional guru merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat guru sebagai profesi yang mulia dan terhormat, melindungi hak-hak guru sebagai pekerja profesional yang menjalankan profesi sebagai pendidik, antara lain meliputi ; perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) dan imbalan yang tidak wajar, perlindungan kebebasan guru dalam proses pendidikan dan tindak pelecehan, atau jaminan keselamatan dan rasa aman, perlindungan atas kebebasan guru dalam berorganisasi berkumpul dan terlibat dalam kebijakan pendidikan menurut (Mustofa, 2019). Salah satu contoh kasus yaitu Guru SMK Gajah Mungkur (GM) 1 Wuryantoro berinisial M yang dilaporkan menganiaya muridnya dikarenakan murid tersebut melanggar disiplin saat upacara bendera (Sulistiyowati, 2011). Beberapa contoh kasus lainnya adalah kasus Samhudi yang dilaporkan oleh wali murid, guru SMP Raden Rahmat, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Samhudi merupakan terdakwa atas kasus guru mencubit siswa yang bikin heboh dunia pendidikan. Atas vonis majelis hakim tersebut, belum mengambil langkah hukum selanjutnya atau masih pikir-pikir. Menurut Ketua Majelis Hakim, Rini Sesuni, terdakwa terbukti melanggar Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 04 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis memiliki pertimbangan tersendiri, sehingga vonis hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 6 bulan penjara (Robertus, 2016).

Menurut (Bunjamin, 2016) menyatakan bahwa posisi guru, sebagai elemen profesional, harus ditingkatkan dan ditingkatkan perannya sebagai agen proses belajar-mengajar di sekolah. Peran ini juga akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di tingkat nasional serta sumber daya manusia Indonesia secara umum. Profesionalisme guru memiliki posisi sentral dan strategis. Karena posisinya tersebut, baik dari kepentingan pendidikan nasional maupun tugas fungsional guru, semuanya menuntut agar pendidikan dilaksanakan secara profesional. Pembahasan tentang guru profesional terkait dengan beberapa istilah, yaitu profesi, profesional itu sendiri, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesionalitas. Profesi adalah pernyataan pengabdian pada suatu pekerjaan atau jabatan dimana pekerjaan atau jabatan tersebut menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Profesional menunjuk pada orang atau penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Profesionalisasi menggambarkan proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui pendidikan. Profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi yang menyangkut sikap, komitmen, dan kode etik (Hendri, 2010).

Menurut (McKenzie et all, 2013) menyatakan bahwa sangatlah penting mengakui kedalaman dan sifat dari masalah yang dihadapi pendidikan. Dan dalam proses mencoba untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah atau tantangan yang dihadapi harus memastikan bahwa tidak menghancurkan moral guru, karena ini akan berdampak negatif pada profesi guru. Pihak yang terkait juga harus menyadari bahwa bagaimana memperlakukan guru hari ini mungkin berdampak pada profesi besok. Dan, yang penting adalah profesi guru tidak diperlakukan sebagai pekerjaan yang tidak stabil karena ini dapat mengancam dan akhirnya menakuti calon guru yang hebat.

Pada saat ini guru seperti kehilangan kewenangannya di sekolah dalam melakukan pengajaran dan seperti acuh terhadap tingkah laku siswa di sekolah. Efeknya sangat jelas ketika hal tersebut berimbas kepada sikap, perilaku, dan

moral peserta didik dalam kesehariannya seperti siswa akhirnya berani melawan guru, siswa melakukan aksi ugal-ugalan dijalanan, bahkan siswa seperti tidak takut pada apapun dalam kesehariannya.

Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi guru. Perlindungan hukum merupakan upaya guru agar terlindungi haknya. Dengan demikian, dalam KUHP, pemeriksaan kasus tindak pidana harus dilaksanakan dengan memahami manusia dan kemanusiaan, yang wajib dilindungi harkat martabatnya. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHP sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Untuk melindungi pendidik, guru/dosen dalam menjalankan tugas luhurnya tersebut, pembangunan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 juga membawa konsekuensi atau implementasi terhadap pendidikan, termasuk terhadap guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas hak atas hasil kekayaan intelektual.

Proses pendidikan yang seharusnya meliputi tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan, lebih mendominasi pada ranah pengetahuan. Akibatnya, banyak anak pintar tapi sikap dan perilakunya kurang baik, dengan jumlah kenaikan remaja yang semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan bahkan sudah masuk di kategori tindakan kriminalitas. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus segera merealisasikan perlindungan guru, agar dalam melaksanakan tugas guru merasa nyaman, dan tentram, serta tidak mudah dikriminalisasi.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman para guru terhadap perlindungan guru sekolah negeri dalam menjalankan tugas profesional, dan untuk mendeskripsikan penerapan perlindungan guru sekolah negeri dalam menjalankan tugas profesional.



## **2. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (Afrizal, 2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu – ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau menguantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah kegiatan pengumpulan bahan keterangan atau data yang dilakukan secara sistematis mengenai cara hidup serta berbagai aktivitas sosial dan berbagai benda kebudayaan dari suatu masyarakat (Harsono, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis satu situs Miles dan Huberman dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Teknik analisis satu situs yaitu menganalisis data dari masing-masing situs secara tersendiri, teknik analisis satu situs ini adalah penelitian yang menempatkan sebuah kasus sebagai fokus penelitian. Teknik dalam memeriksa keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dengan teknik triangulasi sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Pacitan yang beralamat di Jalan H. Kusnan No. 9, Desa Kayen, Kecamatan Pacitan. Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. SMA Negeri 2 Pacitan merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Pacitan yang memiliki kualitas baik dan telah terakreditasi A. Selain itu SMA Negeri 2 Pacitan juga merupakan sekolah favorit ke 2 di kota Pacitan. SMA Negeri 2 Pacitan ini menjadi objek penelitian oleh peneliti khususnya guru karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana perlindungan guru diterapkan, karena dari banyaknya fakta atau kasus di dunia pendidikan guru sering terlibat

dalam permasalahan dengan siswa, wali murid, dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan perlindungan guru yang baik oleh pemerintah yaitu dengan pemahaman dan penerapan sehari-hari dalam menjalankan tugas profesional guru.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang perlindungan guru sekolah negeri dalam menjalankan tugas profesional di SMA Negeri 2 Pacitan menunjukkan bahwa adanya empat regulasi yang menjadi payung hukum diberikan oleh pemerintah kepada para guru untuk menunjang tugas profesional guru sehari-hari, penerapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap guru secara baik dan benar dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugas profesi sebagai seorang guru, pemberian kesejahteraan dan tunjangan hidup terhadap profesi guru juga akan berdampak pada tanggung jawab dan peran profesi guru.

#### **3.1 Pemahaman para guru terhadap perlindungan guru sekolah negeri dalam menjalankan tugas profesional di SMA Negeri 2 Pacitan**

Berdasarkan hasil penelitian pada 6 narasumber maka hasil penelitian membuktikan bahwa para guru memiliki pemahaman terhadap perlindungan guru sekolah negeri dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dalam pemahaman para guru tentang perlindungan guru, terdapat beberapa guru yang memahami tentang perlindungan guru. Guru yang memahami tentang perlindungan guru dalam menjalankan tugasnya mengacu pada beberapa peraturan baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. Adapun pemahaman-pemahaman yang didapat dari hasil penelitian yaitu Adanya empat regulasi yang menjadi payung hukum guru dalam menjalankan tugas profesional sehari-hari yaitu UU Nomer 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian MOU antara PGRI dan Kepolisian (Kapolri), lalu PP ( Peraturan Pemerintah) Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, kemudian Permendikbud Nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidik.

Hasil tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan (Nisa dkk, 2018) guru akan merasa aman dan nyaman ketika peraturan menteri tersebut dapat terealisasi sebagaimana mestinya ketika guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah melaksanakan tugasnya.

(Dirhamsyah, 2011) menjelaskan bahwa kewajiban guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, melakukan penilaian dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan IPTEK, melaksanakan tugas secara objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan, kode etik guru, dan nilai-nilai agama serta etika serta memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Hasil Penelitian yang relevan dengan yang dilakukan oleh Harpani (Matnuh, 2018) guru berhak untuk memberisanksi siswa mereka yang melanggar norma agama, moralitas norma, norma kesusilaan, aturan tertulis dan tidak tertulis yang ditetapkan olehguru, peraturan dan peraturan tingkat satuan pendidikan undang-undang di bawah otoritas.

### **3.2 Penerapan perlindungan guru sekolah negeri dalam menjalankan tugas profesional di SMA Negeri 2 Pacitan**

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen, dan observasi pada 6 narasumber maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan perlindungan guru sekolah negeri sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap guru secara baik dan benar dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugas profesi sebagai seorang guru.

(Komara, 2016) menjelaskan bahwa Perlindungan hukum bagi guru merupakan bagian integral dari upaya untuk memenuhi hak-hak guru, sesuai dengan amanat pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen. Maslahat tambahan bagi guru merupakan tambahan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain.

Hasil Penelitian yang relevan dilakukan oleh (Budoyo dkk, 2017) perlunya sosialisasi hak-hak guru yang dimiliki baik kepada guru maupun masyarakat serta perlunya hak imunitas (kekebalan hukum) yang diatur oleh Undang-Undang, yang bertujuan untuk memastikan bahwa guru mendapatkan perlindungan ketika mendisiplinkan siswa mereka dalam mengimplementasikan tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005.

Berdasarkan analisis data di atas, maka dapat dilihat beberapa perbedaan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu, yaitu : tentang penerapan kinerja tugas profesionalisme guru, subyek dan budaya sekolah, serta obyek tentang penelitian. Kinerja tentang tugas profesionalisme guru dalam penelitian ini menunjukkan bahwa guru sudah diberi pelatihan dan keterampilan tentang kinerja menjadi seorang guru profesional, sedangkan untuk penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya guru yang belum memenuhi sebagai guru profesional.

Subyek dan budaya sekolah dalam penelitian ini menunjukkan adanya beberapa pihak yang menunjukkan peran serta aktif dalam menerapkan perlindungan profesional guru dan sekolah memiliki budaya yang positif dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan untuk penelitian terdahulu masih terdapat beberapa yang belum menunjukkan secara signifikan peran aktif dan budaya positif dari berbagai pihak.

Obyek lingkup penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada profesi guru dalam memperoleh perlindungan guru untuk menjalankan tugas profesionalnya, sedangkan dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa obyek lingkup penelitian tersebut sangat luas sehingga belum menunjukkan informasi yang lebih dalam tentang obyek penelitian tersebut.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian tentang Perlindungan Guru Sekolah Negeri Dalam

Menjalankan Tugas Profesional di SMA Negeri 2 Pacitan telah tercapai, maka diperoleh kesimpulan, (1) Adanya empat regulasi yang menjadi payung hukum diberikan oleh pemerintah kepada para guru untuk menunjang tugas profesional guru sehari-hari (2) Penerapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap guru secara baik dan benar dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugas profesi sebagai seorang guru (3) Pemberian kesejahteraan dan tunjangan hidup terhadap profesi guru juga akan berdampak pada tanggung jawab dan peran profesi guru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budoyo, S., Gunarto., Hafidz, J. (2017). Desperate needs of teacher's law protection as a professional educator in Indonesia. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 4 (7).
- Bunjamin. (2016). Teacher Professionalism: A Study on Teacher's Professional and Pedagogic Competence at Vocational High Schools in The Northern Coastal of Jakarta. *Indonesian Journal of Educational Review. Volume 2 (1)*.
- Dirhansyah, F. (2011). Dilematika Profesi Guru "Studi Tentang Undang-Undang Guru dan Dosen". Universitas Negeri Islam Malang.
- Harsono (2016). Etnografi pendidikan: suatu desain penelitian kualitatif. Surakarta: Gumpang Agung III.
- Hendri, E. (2010). Guru Berkualitas : profesional dan cerdas emosi. *Jurnal Saung Guru*, 1(2),1.
- Komara, E.(2016). Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. *Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, 1(2). Bandung.
- Matnuh, H. (2018). The Legal Protection of Teacher Professionalism. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 251
- McKenzie, E. K., Bantwini, B., Bogan, B. (2013). Supporting Teachers to Enhance Students Success in The USA and South Africa. *International Journal of Humanities and Social Science*, volume 3 (15).
- Mudlofir, A. (2012). Pendidik Profesional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, S. (2019). Mencari Perlindungan Guru. Mataram: Guepedia

- Nisa, A. N. S., Hermanto, P., Ginanjar, A., & Putri, N. A. (2018). Persepsi Guru Mengenai Permendikbud No. 10 Tahun 2017 Tentang Kependidikan Di Kota Semarang, *Jurnal Harmony*, Vol. 3 (2).
- Robertus, R. (2016). Kisah Guru Cubit Siswa yang Berujung Penjara, Guru Samhudi Divonis Tiga Bulan. M.tribunnews.com. Edisi terbit Kamis, 4 Agustus 2016.
- Sulistyowati, A. (2011). Aniaya Murid, Guru SMK GM 1 Terancam Hukuman 3,5 Tahun. Harian solopos.com. Edisi terbit tanggal 9 Februari 2011.